

**INSPEKTORAT**



# Laporan Hasil Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan  
**DPM-PTSP**  
KABUPATEN MUNA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

2025

NOMOR :  
**700.1.2.1/23/IRBAN.II/INSP/2025**  
Tanggal : 20 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT  
**INSPEKTORAT**  
*Jl. Poros Lagadi-Tondasi, Desa Lapolea, Kec. Barangka*

Laworo, 20 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.1/23/IRBAN II/INSP/2025  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2024 pada DPM-PTSP Kab. Muna Barat

Kepada Yth,

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Muna Barat**

di-

T e m p a t

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan hasil sebagai berikut:

**1. Pendahuluan**

**a. Dasar Hukum Evaluasi**

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Muna Barat Tahun 2025;
4. Surat Tugas Inspektur Nomor 800.1.11.1/020/II/INSP/2024 Tanggal 03 Februari 2025

## **b. Latar Belakang Evaluasi**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan setiap instansi mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta meminimalkan pemborosan anggaran negara.

Evaluasi SAKIP berlandaskan pada berbagai peraturan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahan. Salah satu aturan utama yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi untuk menyusun perencanaan kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melaporkan hasil kinerja, serta melakukan evaluasi secara berkala. Selain itu, evaluasi SAKIP juga berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan evaluasi guna memastikan penerapan prinsip *good governance*..

Melalui evaluasi SAKIP, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajemen kinerja dan memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Evaluasi ini juga berperan dalam meningkatkan budaya kinerja berbasis hasil (*performance-based management*) di lingkungan birokrasi, sehingga anggaran yang digunakan dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, evaluasi SAKIP tidak hanya bertujuan untuk menilai akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mendorong reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

## **c. Tujuan Evaluasi**

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan beberapa tujuan utama, antara lain:

### **1) Menilai Akuntabilitas Kinerja**

Untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan visi, misi, serta tujuan strategis yang telah ditetapkan

**2) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi**

Untuk memastikan bahwa anggaran yang digunakan oleh instansi pemerintah telah dialokasikan secara efisien dan memberikan hasil yang optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

**3) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Publik**

Evaluasi SAKIP bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan kinerja instansi sehingga masyarakat dapat mengetahui pencapaian dan efektivitas program yang dijalankan pemerintah

**4) Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran**

Dengan evaluasi, pemerintah dapat memastikan bahwa perencanaan program dan penggunaan anggaran sudah selaras dengan target kinerja yang ingin dicapai.

**5) Memberikan Rekomendasi Perbaikan**

Hasil evaluasi SAKIP digunakan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan sistem pengelolaan kinerja instansi pemerintah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan.

**6) Memperkuat Budaya Kinerja Berbasis Hasil**

Evaluasi membantu membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pada *output* atau administrasi belaka.

**7) Mendukung Reformasi Birokrasi**

Evaluasi SAKIP merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

**d. Ruang Lingkup Evaluasi**

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan di instansi pemerintah. Ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup beberapa aspek berikut :

**1) Perencanaan Kinerja**

- Kesesuaian dokumen perencanaan strategis dengan visi, misi, dan tujuan organisasi

- Keterpaduan antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja.
- Keterkaitan antara indikator kinerja utama (IKU) dengan sasaran strategis organisasi.

## **2) Pengukuran Kinerja**

- Kesesuaian metode pengukuran kinerja dengan indikator yang telah ditetapkan.
- Keandalan data dan informasi kinerja yang digunakan dalam evaluasi.
- Konsistensi antara capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan

## **3) Pelaporan Kinerja**

- Kualitas laporan kinerja yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas
- Keselarasan antara laporan kinerja dan realisasi program/kegiatan
- Kepatuhan terhadap format dan standar pelaporan kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

## **4) Evaluasi Kinerja Internal**

- Pelaksanaan reviu dan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja.
- Identifikasi permasalahan serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan
- Pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang

## **5) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

- Upaya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan SAKIP di instansi pemerintah
- Pemanfaatan hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan yang berbasis kinerja
- Komitmen pimpinan dan unit kerja dalam memperkuat budaya kinerja dan akuntabilitas.

Evaluasi SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa instansi pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, serta bertanggung jawab sesuai dengan prinsip good governance.

Pelaksanaan evaluasi AKIP dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai tanggal 3 Februari sampai dengan 21 Februari 2025 dengan susunan tim evaluasi sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Agustamin Sujono, S.P.,M.M
2. Wakil Penanggung Jawab : Irwan, S.E
3. Pengendali Teknis : Hikmah Nilawati S., SH., MT.
4. Ketua Tim : La Ode Hiliawan, S.T
5. Anggota Tim : 1. Muh. Syaban Nur Ashar Ode, S.P  
2. Muh. Yan Surya Pancana, S.H  
3. Afi Fuddin, S.H

#### e. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AA (Bobot nilai 100)</b> | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional     |
| <b>A (Bobot nilai 90)</b>   | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut |
| <b>BB (Bobot nilai 80)</b>  | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan                                                  |
| <b>B (Bobot nilai 70)</b>   | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75%-100%)                                                                     |
| <b>CC (Bobot nilai 60)</b>  | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50%-75%)                                                                      |
| <b>C (Bobot nilai 50)</b>   | Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25%-50%)                                                                      |
| <b>D (Bobot nilai 30)</b>   | Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja mulai terpenuhi (>0%-25%)                                                               |
| <b>E (Bobot nilai 0)</b>    | Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja                                             |

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen.

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir.

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

| Predikat                     | Interpretasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AA (Nilai &gt;90-100)</b> | <b>Sangat Memuaskan</b><br>Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.                                                                                                                                                        |
| <b>A (Nilai &gt;80-90)</b>   | <b>Memuaskan</b><br>Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/Subkoordinator.                                                                                                                                                                          |
| <b>BB (Nilai &gt;70-80)</b>  | <b>Sangat Baik</b><br>Terdapat gambaran AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. |
| <b>B (Nilai &gt;60-70)</b>   | <b>Baik</b><br>Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.                                                                                                                          |
| <b>CC (Nilai &gt;50-60)</b>  | <b>Cukup (Memadai)</b><br>Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>C (Nilai &gt;30-50)</b>   | <b>Kurang</b><br>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>D (Nilai &gt;0-30)</b>    | <b>Sangat Kurang</b><br>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.                                                                                                                                                              |

**f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja**

**1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja**

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- (1) Kepala Dinas : **Drs. La Ode Hanafi**
- (2) Sekretaris : **LM. Masrul, S.Pd., M.Pd**
  - a) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian: -
  - b) Sub Bagian Perencanaan, Aset, dan Evaluasi : -
- (3) Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal : Zailin, S.Pd., M.Si
  - a) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: -
  - b) Seksi Promosi Penanaman Modal: -
  - c) Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: -
- (4) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan : H.Amiruddin, S.Ip., MM.
  - a) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I : Sadli, S.Si
  - b) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II : -
  - c) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III : -
- (5) Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan : -
  - a) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan : -
  - b) Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan: -
  - c) Seksi Pelaporan dan Peningkatan Pelayanan : -

**2) Tugas dan Fungsi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

3. Pembinaan, kordinasi, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya

### 3) Indikator Kinerja Utama

| TUJUAN                                                  | INDIKATOR TUJUAN                | SASARAN                                                   | INDIKATOR SASARAN                                                       | SATUAN   | FORMULA                                                                                                                          | PENANGGUNG JAWAB                                         | SUMBER DATA      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| Meningkatnya Transparansi dan Kualitas Pelayanan Publik | Opini Ombudsman                 | Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan | Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan | Nilai    | $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsir}}{\text{Total Unsir yang Terisi}} \times \text{Nilai Peimbang}$                 | Bidang Perizinan, Bidang Pengaduan dan Informasi Layanan | Hasil Survei IKM |
|                                                         | Meningkatnya Kegiatan Investasi | Meningkatnya realisasi investasi                          | Pertumbuhan nilai realisasi investasi                                   | %        | $\frac{\text{Nilai investasi tahun (n)} - \text{Nilai Investasi tahun (n-1)}}{\text{Nilai investasi tahun (n-1)}} \times 100 \%$ | Bidang Penanaman Modal                                   | OSS              |
|                                                         | Nilai SAKIP OPD                 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja                        | Predikat SAKIP                                                          | Predikat | Penilaian Inpektorat Kabupaten                                                                                                   | Sekretariat                                              | LHE Inspektorat  |

### 4) Perjanjian Kinerja

#### a) Perjanjian Kinerja Kepala Badan

| No. | Sasaran Program                                                                         | Indikator Kinerja                                           | Target     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | Meningkatnya kualitas layanan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan publik | Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan | 92%        |
| 2   | Meningkatnya kegiatan investasi                                                         | Pertumbuhan Nilai realisasi investasi                       | 5.5%       |
| 3   | Meningkatnya akuntabilitas Kinerja                                                      | Nilai SAKIP OPD                                             | Predikat B |

#### b) Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

| No. | Sasaran Program                                          | Indikator Kinerja                                       | Target    |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1   | Terlaksananya Promosi Penanaman Modal Kabupaten          | Jumlah Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten | 1 Dokumen |
| 2   | Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian penanaman Modal | Presentase kegiatan penanaman modal yang terkendali     | 100%      |

- c) Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

| No. | Sasaran Program                                                                                                                                            | Indikator Kinerja                                                              | Target |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Meningkatnya layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal                                                                                           | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu              | 100%   |
| 2   | Meningkatnya pengelolaan data dan system informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik | Persentase pemanfaatan data dan system informasi perizinan berbasis elektronik | 100%   |

- d) Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

| No. | Sasaran Program                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                          | Target |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1   | Meningkatnya kualitas layanan pengaduan perizinan dan non perizinan penanaman modal | Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap kegiatan perizinan dan non perizinan penanaman modal | 100%   |
| 2   | Meningkatnya informasi layanan pengaduan                                            | Persentase penggunaan layanan pengaduan secara elektronik                                                  | 100%   |

#### 5) Jumlah Anggaran Yang Dikelola Tahun Anggaran 2024

| No. | Program                              | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-----|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 1   | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 2.375.305.947 | 2.307.939.889  |
| 2   | Program Promosi Penanaman Modal      | 130.000.000   | 130.000.000    |
| 3   | Program Pelayanan Penanaman Modal    | 50.958.000    | 48.475.000     |

|   |                                                  |                      |                      |
|---|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 575.036.000          | 569.050.000          |
| 5 | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi    | 315.969.000          | 315.133.000          |
|   | <b>Jumlah</b>                                    | <b>3.448.190.947</b> | <b>3.370.597.889</b> |

**g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muna Barat pada tahun anggaran 2024 telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan SAKIP ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan adanya sistem ini, DPMPTSP dapat mengukur capaian kinerja secara objektif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk nyata dari implementasi SAKIP, DPMPTSP Kabupaten Muna Barat telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024. LKjIP ini menjadi dokumen utama yang menggambarkan hasil kinerja yang telah dicapai sepanjang tahun anggaran 2024, termasuk efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan dokumen pendukung lainnya juga dilakukan untuk memperkuat pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Penerapan SAKIP di DPMPTSP Kabupaten Muna Barat menunjukkan komitmen instansi dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Dengan adanya sistem ini, kinerja instansi dapat dievaluasi secara lebih baik, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang dapat terus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

**h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Muna Barat terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 700.1.2.1/006/III/INSP/2024 Tanggal 19 Maret 2024, Nilai implementasi SAKIP adalah **71,60 (Tujuh Puluh Satu Koma Enam Puluh)** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**. Tim Evaluator

merekomendasikan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Tugas-Tugas pada perjanjian kinerja agar di turunkan pada pegawai fungsional dan staf dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- 2) Melakukan Reviu atas penetapan indikator kinerja utama agar memenuhi kriteria spesifik (*Spesific*), Dapat terukur (*Measurable*), dapat di capai (*Attainable*), Berjangka waktu tertentu (*Time Bound*), dapat di pantau dan di kumpulkan (*Trackable*);
- 3) Melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja;
- 4) Setiap Unit kerja/bidang menyusun laporan kinerja secara periodic (Triwulan) dan kemudian direviu serta dilakukan evaluasi yang terjadwal atas pencapaian kinerja oleh tim evaluator internal OPD.
- 5) Menyusun rancangan peraturan bupati yang mengatur penempatan kerja pegawai seperti mutase, rotasi, promosi, demosi, hingga pemberhentian kerja yang berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai;
- 6) Menyusun pedoman teknis tentang evaluasi akuntabilitas kinerja internal OPD;
- 7) Membentuk tim evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang di tetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas

Berdasarkan rekomendasi yang di berikan oleh Inspektorat Muna Barat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 ditemukan belum keseluruhnya menindaklanjuti rekomendasi tersebut diatas. Terdapat 2 (dua) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti yaitu:

- 1) Melakukan Reviu atas penetapan indikator kinerja utama agar memenuhi kriteria spesifik (*Spesific*), Dapat terukur (*Measurable*), dapat di capai (*Attainable*), Berjangka waktu tertentu (*Time Bound*), dapat di pantau dan di kumpulkan (*Trackable*);
- 2) Menyusun rancangan peraturan bupati yang mengatur penempatan kerja pegawai seperti mutase, rotasi, promosi, demosi, hingga pemberhentian kerja yang berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai

#### 4. Gambaran Hasil Evaluasi

##### a. Kondisi

Evaluasi yang kami lakukan dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran angka 70 sampai dengan 80. Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai **78,39 (Tujuh Puluh Delapan Koma Tiga Puluh Sembilan)** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

##### 1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan kinerja diperoleh capaian sebesar **24,29** dari nilai maksimum **30,00**. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024;
- b. Pedoman teknis perencanaan kinerja mengacu pada Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Dokumen perencanaan kinerja belum seluruhnya diformalkan dan dipublikasikan/di upload di *website* e-SAKIP dan *website* OPD dengan tepat waktu;
- d. Perlu dilakukan peningkatan kualitas pemetaan program dan kegiatan agar lebih efektif dalam mencapai sasaran strategis.;
- e. Perencanaan kinerja telah ditetapkan oleh pegawai eselon II,III dan IV, namun tugas-tugas pada perjanjian kinerja belum diturunkan pada pegawai fungsional dan staf dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

##### 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran kinerja diperoleh capaian sebesar **24,72** dari nilai maksimum **30,00**. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menetapkan SOP pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
- b. Pimpinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu belum selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja.;
- c. Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan telah diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat No.73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No. 33 Tahun 22 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Muna Barat ;
- d. Belum adanya Peraturan/Surat Keputusan Bupati yang mengatur penempatan kerja pegawai seperti mutasi, rotasi, promosi, demosi, hingga pemberhentian kerja yang berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai.

### 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan kinerja diperoleh capaian sebesar **10,99** dari nilai maksimum **15,00**. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) namun terdapat beberapa kualitas laporan belum sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
  - Belum mencantumkan tentang tabel perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
  - Belum menjelaskan dan Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
  - Belum menjelaskan tentang perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target standar nasional/ RPJMN
- b. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah dipublikasikan/diupload di *website* e-SAKIP;

#### 4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal diperoleh capaian sebesar **25,00** dari nilai maksimum **18,39**. Hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah ditetapkan pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang ditetapkan oleh kepala Dinas;
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang oleh internal OPD;
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai dan pendalaman sesuai dengan SDM yang memadai;

#### 5) Evaluasi atas Capaian Kinerja

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyajikan pencapaian kinerja namun informasi capaian kinerja *output* dan *outcome* belum dapat diandalkan.

Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sedangkan hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

#### b. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

- 1) Seluruh dokumen perencanaan kinerja yang disusun setiap tahun ditandatangani kepala OPD, distempel dan diberi tanggal penetapan serta diupload pada *website* OPD dan *website* KemenPANRB dengan tepat waktu;
- 2) Pimpinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu belum selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja.
- 3) Melakukan reviu atas penetapan Indikator Kinerja Utama agar memenuhi kriteria spesifik (*Spesific*), dapat terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), berjangka waktu tertentu (*Time Bound*), dapat dipantau dan dikumpulkan (*Trackable*);
- 4) Menyusun rancangan Peraturan Bupati yang mengatur penempatan kerja pegawai seperti mutasi, rotasi, promosi, demosi, hingga pemberhentian kerja yang berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai;

- 5) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan memperhatikan acuan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014;
- 6) Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan secara berkualitas dengan di dukung Sumber Daya yang memadai dan pendalaman sesuai dengan SDM yang memadai;

## 5. Penutupan

### a. Simpulan

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai **78,39 (Tujuh Puluh Delapan Koma tiga puluh Sembilan)** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Predikat tersebut sesuai dengan target predikat implementasi SAKIP yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun 2024.

### b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang lebih baik Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk mendorong implementasi **SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** yang lebih baik:

#### ➤ Penguatan Komitmen Pimpinan

- ✓ Meningkatkan peran aktif pimpinan dalam mendorong budaya kinerja berbasis akuntabilitas
- ✓ Memastikan pemimpin memahami pentingnya SAKIP dan mengawal implementasi

#### ➤ Penyempurnaan Perencanaan Kinerja

- ✓ Menyusun perencanaan kinerja yang lebih terfokus pada hasil (outcome), bukan hanya output
- ✓ Menyelaraskan perencanaan kinerja dengan tujuan strategis instansi dan kebijakan nasional

#### ➤ Penguatan Pengukuran Kinerja

- ✓ Menggunakan data berbasis evidence untuk menilai pencapaian kinerja

#### ➤ Optimalisasi Evaluasi dan Pengawasan Kinerja

- ✓ Meningkatkan kualitas evaluasi kinerja melalui monitoring yang lebih ketat
- ✓ Memanfaatkan sistem informasi untuk pengawasan dan pelaporan berbasis teknologi.
- **Peningkatan Kapasitas SDM**
  - ✓ Melakukan pelatihan rutin bagi pegawai agar lebih memahami konsep SAKIP
  - ✓ Membangun tim kerja yang memiliki kompetensi dalam akuntabilitas kinerja
- **Peningkatan Kolaborasi dan Koordinasi Antar Instansi**
  - ✓ Memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan SAKIP.
  - ✓ Meningkatkan komunikasi antara unit kerja agar pencapaian kinerja lebih terarah
- **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik**
  - ✓ Membuka akses publik terhadap hasil evaluasi kinerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
  - ✓ Melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam penilaian serta umpan balik terhadap kinerja instansi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi ini dibuat Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan disampaikan sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

  
 Inspektur Daerah  
 Kabupaten Muna Barat  
**AGUSTAMIN SUJONO, S.P.,M.M**  
 Pembina Utama Muda, Gol. IV/c  
 NIP. 19680802 198903 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Muna Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Ortala Sekretariat Daerah

# KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

## INSPEKTORAT KAB. MUNA BARAT

Nama Satuan Kerja : DPM-PTSP  
 Nama Kepala Satuan Kerja : Drs. LAODE HANAFI

**Petunjuk\*=** - Dasar PermenPAN&RB Nomor 88 Tahun 2021  
 - Jawaban berisi NILAI dengan cara MENGALIKAN KUALITAS (misalnya 50%) dengan BOBOT PERKOMPONEN (Contoh 1.a terdapat 7 kriteria, jika terpenuhi 4 kriteria berarti SEBAGIAN BESAR ADA dengan nilai 70 (lihat metode evaluasi di Juknis), artinya  $70\% \times 6,00$  (bobot komponen)  
 - Daftar evidence diisi dengan Bukti-bukti kriteria yang ada sesuai kondisi riil  
 - Catatan diisi kriteria apa saja yang belum ada sebagai kondisi riil

**ISILAH DENGAN ANGKA ANTARA 0 S.D. 100 PADA BLOK BIRU SESUAI PETUNJUK LKE DI SAMPING**

| No               | Komponen/Sub Komponen/Kriteria                                                                                                                                                                        | Bobot | Instansi                                   |       |          |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|----------|-------|
|                  |                                                                                                                                                                                                       |       | Jawaban*<br>0 s.d. 100<br>(ikuti petunjuk) | Nilai | Kualitas |       |
| 1                | PERENCANAAN KINERJA                                                                                                                                                                                   | 30.00 | 80.97                                      | 24.29 | A        |       |
| 1.a              | Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia                                                                                                                                                            | 6.00  | 90.00                                      | 5.40  | A        | 90.00 |
| <b>Kriteria:</b> |                                                                                                                                                                                                       |       |                                            |       |          |       |
| 1                | Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.                                                                                                                                                          |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 2                | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.                                                                                                                                                  |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 3                | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.                                                                                                                                                 |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 4                | Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.                                                                                                                                                   |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 5                | Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.                                                                                                                                        |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 6                | Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.                                                                                                                                         |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 1.b              | Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran                                                                                               | 9.00  | 82.27                                      | 7.40  | A        | 82.27 |
| <b>Kriteria:</b> |                                                                                                                                                                                                       |       |                                            |       |          |       |
| 1                | Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.                                                                                                                                                        |       |                                            |       |          | 75.00 |
| 2                | Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.                                                                                                                                         |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 3                | Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.                                                                                                 |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 4                | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.                                                                                                  |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 5                | Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.                                                                                                                                |       |                                            |       |          | 80.00 |
| 6                | Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 7                | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.                                                                                                |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 8                | Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).                            |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 9                | Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).               |       |                                            |       |          | 90.00 |
| 10               | Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.                                                                                                                               |       |                                            |       |          | 90.00 |

|           |                                                                                                                                                        |       |       |       |    |       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|-------|
| 11        | Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.                                                                                          |       |       |       |    | 30.00 |
| 1.c       | Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan                                                                    | 15.00 | 70.63 | 10.59 | BB | 70.63 |
| Kriteria: |                                                                                                                                                        |       |       |       |    |       |
| 1         | Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.                                                                                |       |       |       |    | 90.00 |
| 2         | Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.                                                                                |       |       |       |    | 30.00 |
| 3         | Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .                          |       |       |       |    | 50.00 |
| 4         | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.                                                     |       |       |       |    | 80.00 |
| 5         | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.                         |       |       |       |    | 75.00 |
| 6         | Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.                                           |       |       |       |    | 75.00 |
| 7         | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.                                        |       |       |       |    | 90.00 |
| 8         | Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.                                                  |       |       |       |    | 75.00 |
| 2         | PENGUKURAN KINERJA                                                                                                                                     | 30.00 | 82.40 | 24.72 | A  |       |
| 2.a       | Pengukuran Kinerja telah dilakukan                                                                                                                     | 6.00  | 90.00 | 5.40  | A  | 90.00 |
| Kriteria: |                                                                                                                                                        |       |       |       |    |       |
| 1         | Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.                                                                               |       |       |       |    | 90.00 |
| 2         | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.                                                             |       |       |       |    | 90.00 |
| 3         | Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.                                                                 |       |       |       |    | 90.00 |
| 2.b       | Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan | 9.00  | 80.71 | 7.26  | A  | 80.71 |
| Kriteria: |                                                                                                                                                        |       |       |       |    |       |
| 1         | Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.                                                  |       |       |       |    | 50.00 |
| 2         | Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.                                                            |       |       |       |    | 85.00 |
| 3         | Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.                                                                         |       |       |       |    | 90.00 |
| 4         | Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.                                                                                                     |       |       |       |    | 90.00 |
| 5         | Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.                                        |       |       |       |    | 90.00 |
| 6         | Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).                                                                            |       |       |       |    | 80.00 |
| 7         | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).                                                                          |       |       |       |    | 80.00 |
| 2.c       | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam                                                                                                         | 15.00 | 76.50 | 11.48 | BB | 76.50 |
| Kriteria: |                                                                                                                                                        |       |       |       |    |       |
| 1         | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.                                        |       |       |       |    | 90.00 |
| 2         | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.                                         |       |       |       |    | 75.00 |
| 3         | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.                                                                             |       |       |       |    | 75.00 |
| 4         | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.                                                                     |       |       |       |    | 75.00 |
| 5         | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.                                                                    |       |       |       |    | 75.00 |
| 6         | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.                                                                    |       |       |       |    | 75.00 |

|                  |                                                                                                                                                                 |       |       |       |    |       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----|-------|
| 7                | Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.                                                                              |       |       |       |    | 75.00 |
| 8                | Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.                                                                                             |       |       |       |    | 75.00 |
| 9                | Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.                                                                                     |       |       |       |    | 75.00 |
| 10               | Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.                                                                                               |       |       |       |    | 75.00 |
| 3                | <b>PELAPORAN KINERJA</b>                                                                                                                                        | 15.00 | 73.28 | 10.99 | BB |       |
| 3.a              | <b>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan</b>                                                                                                              | 3.00  | 86.67 | 2.60  | A  | 86.67 |
| <b>Kriteria:</b> |                                                                                                                                                                 |       |       |       |    |       |
| 1                | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.                                                                                                                          |       |       |       |    | 90.00 |
| 2                | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.                                                                                                           |       |       |       |    | 90.00 |
| 3                | Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.                                                                                                                      |       |       |       |    | 90.00 |
| 4                | Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.                                                                                                                          |       |       |       |    | 70.00 |
| 5                | Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.                                                                                                                   |       |       |       |    | 90.00 |
| 6                | Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.                                                                                                          |       |       |       |    | 90.00 |
| 3.b              | <b>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan</b>                          | 4.50  | 68.89 | 3.10  | B  | 68.89 |
| <b>Kriteria:</b> |                                                                                                                                                                 |       |       |       |    |       |
| 1                | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.                                                                                       |       |       |       |    | 80.00 |
| 2                | Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.                                                                          |       |       |       |    | 80.00 |
| 3                | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.                                                        |       |       |       |    | 80.00 |
| 4                | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.                                                |       |       |       |    | 50.00 |
| 5                | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.                              |       |       |       |    | 80.00 |
| 6                | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja). |       |       |       |    | 30.00 |
| 7                | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.                |       |       |       |    | 70.00 |
| 8                | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.                                                         |       |       |       |    | 80.00 |
| 9                | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).                                   |       |       |       |    | 70.00 |
| 3.c              | <b>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</b>                              | 7.50  | 64.29 | 4.82  | B  | 64.29 |
| <b>Kriteria:</b> |                                                                                                                                                                 |       |       |       |    |       |
| 1                | Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).                                                                    |       |       |       |    | 70.00 |
| 2                | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.                                                                                   |       |       |       |    | 60.00 |
| 3                | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.                                                     |       |       |       |    | 60.00 |
| 4                | Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.                                           |       |       |       |    | 60.00 |
| 5                | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.                                                                 |       |       |       |    | 70.00 |
| 6                | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.                                            |       |       |       |    | 70.00 |

|                               |                                                                                                                                                |               |              |              |           |              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 7                             | Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.                                                       |               |              |              |           | 60.00        |
| 4                             | <b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>                                                                                                 | <b>25.00</b>  | <b>73.56</b> | <b>18.39</b> | <b>BB</b> |              |
| 4.a                           | <b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah</b>                                                                                           | <b>5.00</b>   | <b>76.67</b> | <b>3.83</b>  | <b>BB</b> | <b>76.67</b> |
| <b>Kriteria:</b>              |                                                                                                                                                |               |              |              |           |              |
| 1                             | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.                                                                               |               |              |              |           | 80.00        |
| 2                             | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.                                           |               |              |              |           | 80.00        |
| 3                             | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.                                                                  |               |              |              |           | 70.00        |
| 4.b                           | <b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</b>                           | <b>7.50</b>   | <b>70.00</b> | <b>5.25</b>  | <b>B</b>  | <b>70.00</b> |
| <b>Kriteria:</b>              |                                                                                                                                                |               |              |              |           |              |
| 1                             | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.                                                                     |               |              |              |           | 80.00        |
| 2                             | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.                                                              |               |              |              |           | 70.00        |
| 3                             | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.                                                     |               |              |              |           | 60.00        |
| 4                             | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.                                           |               |              |              |           | 70.00        |
| 5                             | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).                                         |               |              |              |           | 70.00        |
| 4.c                           | <b>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi</b>                                                                                      | <b>12.50</b>  | <b>74.00</b> | <b>9.25</b>  | <b>BB</b> | <b>74.00</b> |
| <b>Kriteria:</b>              |                                                                                                                                                |               |              |              |           |              |
| 1                             | Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.                                                  |               |              |              |           | 80.00        |
| 2                             | Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal. |               |              |              |           | 80.00        |
| 3                             | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.                        |               |              |              |           | 70.00        |
| 4                             | Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.                       |               |              |              |           | 70.00        |
| 5                             | Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.                             |               |              |              |           | 70.00        |
|                               |                                                                                                                                                |               |              |              |           |              |
|                               |                                                                                                                                                |               |              |              |           |              |
| <b>TOTAL NILAI (PREDIKAT)</b> |                                                                                                                                                | <b>100.00</b> | <b>78.39</b> | <b>78.39</b> | <b>BB</b> |              |